

"DESA BERSINAR" DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: PROGRAM UNGGULAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) BATU

Dinda Divanda

UIN Sunan Ampel Surabaya
dindadivanda20@gmail.com

Dwi Setianingsih

UIN Sunan Ampel Surabaya
dwisetia@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program "Desa Bersinar" (Bersih Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batu melalui perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengambil studi kasus komparatif di Desa Junrejo dan Kelurahan Temas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Bersinar efektif memperkuat ikatan sosial masyarakat melalui elemen attachment, commitment, involvement, dan belief. Namun, ditemukan disparitas keberhasilan yang signifikan: di Desa Junrejo, program berjalan efektif berkat sinergi antara BNNK dan perangkat desa; sementara di Kelurahan Temas, program mengalami stagnasi akibat resistensi birokrasi lokal yang bermanifestasi dalam bentuk penolakan transparansi data kerawanan wilayah. Penelitian ini menyimpulkan adanya "patologi birokrasi" di tingkat tapak yang melumpuhkan fungsi kontrol sosial institusional. Rekomendasi strategis yang ditawarkan mencakup rekalisasi mekanisme seleksi wilayah berbasis pakta integritas kepemimpinan serta pelebagaan kontrol sosial melalui Peraturan Desa (Perdes) P4GN.

Kata Kunci: Desa Bersinar, Kontrol Sosial, Patologi Birokrasi, Komitmen Lokal, BNNK Batu.

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of the "Desa Bersinar" (Drug-Free Village) program by the National Narcotics Board (BNNK) of Batu City through the perspective of Travis Hirschi's Social Control Theory. Using a descriptive qualitative method, this research conducted a comparative case study in Junrejo Village and Temas Sub-district. The results showed that the Desa Bersinar program effectively strengthened community social bonds through the elements of attachment, commitment, involvement, and belief. However, a significant disparity in success was discovered: in Junrejo Village, the program operated effectively due to the synergy between BNNK and village officials; meanwhile, in Temas Sub-district, the program experienced stagnation due to local bureaucratic resistance, manifested as a refusal of transparency regarding regional vulnerability data. This study concludes that "bureaucratic pathology" at the grassroots level paralyzes institutional social control functions. Strategic recommendations include recalibrating region selection mechanisms based on leadership integrity pacts and institutionalizing social control through Village Regulations (Perdes) on P4GN.

Keywords: Desa Bersinar, Social Control Theory, Bureaucratic Pathology, BNNK Batu City.

Article History: Received 25 June 2025, Revised 17 April 2025,
Accepted 20 April 2025, Available online 30 November 2025

Copyright: © 2025. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Peredaran narkoba marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Peredaran narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan. Mengingat peredaran narkoba yang cukup masif, maka narkoba sudah menjadi ancaman serius di beberapa wilayah di Indonesia. Hampir tidak ada daerah di Indonesia yang masyarakatnya tidak terpapar narkoba.¹ Fenomena ini diperparah oleh letak geografis Indonesia yang rentan terhadap perdagangan dan peredaran ilegal narkoba.² Kota Batu, yang dikenal sebagai kota wisata dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menghadapi tantangan sosiologis yang kompleks.³

Mobilitas penduduk yang tinggi serta heterogenitas masyarakat di wilayah penghubung seperti Desa Junrejo dan Kelurahan Temas menciptakan celah bagi masuknya peredaran gelap narkoba. Secara teoretis, Travis Hirschi dalam *Social Control Theory* menyatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial (social bond) antara individu dan masyarakat melemah.⁴ Di Kota Batu, modernisasi dan perubahan struktur sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa (pariwisata) berisiko mengikis kontrol sosial tradisional; ketika keluarga tidak lagi menjadi benteng pertama dan komunitas kehilangan kepeduliannya, maka peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan produktif meningkat secara signifikan.

Menanggapi tantangan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) meluncurkan kebijakan strategis melalui program "Desa Bersinar" (Desa Bersih Narkoba). Program ini didesain sebagai bentuk desentralisasi pencegahan narkoba dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama. Melalui pilar Ketahanan Keluarga,

¹ Badan Narkotika Nasional. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*. (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020), 3-4. <https://share.google/6jSYuJcNiHHloqAUI>.

² Gonda Yumitro Oktaviani Sukma, "Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi," *Jurnal Education and Development Institut* 10, no. 2 (2022): 137–43.

³ Badan Narkotika Nasional Kota Batu, Profil Badan Narkotika Nasional Kota Batu, (https://sikarsa.um.ac.id/storage/data_cp/cp_NtE8Kn3KWY_111224_1733878927.pdf)

⁴ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "ANALISIS KRITIS TEORI KONTROL SOSIAL DAN APLIKASINYA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN KOMUNITAS," *Jurnal Aktual Justice* 10, no. 1 (2025): 79–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1504>.

Teman Sebaya, dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), BNNK Batu berupaya mengintegrasikan kembali nilai-nilai kontrol sosial ke dalam struktur desa.⁵

Eksistensi Desa Bersinar sebagai program unggulan BNN Kota Batu pada dasarnya menunjukkan potensi yang menjanjikan. Penelitian terdahulu di wilayah Kota Batu mengonfirmasi bahwa program ini cukup efektif dalam menurunkan angka pengguna maupun pengedar, di mana beberapa desa percontohan telah mampu memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan.⁶ Hal ini membuktikan bahwa mekanisme intervensi berbasis wilayah memiliki dampak nyata dalam mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.

Namun demikian, dalam perjalanannya, implementasi kebijakan **top-down** ini seringkali menemui hambatan di tingkat birokrasi lokal. Meskipun data menunjukkan adanya kerawanan yang serupa di beberapa titik, efektivitas program Desa Bersinar menunjukkan hasil yang kontras: Desa Junrejo berhasil dalam penjangkauan klien dan pemetaan wilayah, sementara Kelurahan Temas menghadapi stagnasi yang berujung pada penghentian program. Beberapa studi kritis mengungkapkan bahwa aspek organisasi seringkali belum optimal akibat keterbatasan sumber daya finansial serta sarana prasarana; selain itu, aspek interpretasi dan aplikasi di lapangan masih terkendala oleh kegiatan sosialisasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara rutin.⁷ Kondisi ini diperkuat oleh temuan pada penelitian lain yang menyoroti bahwa efektivitas program kerap terbentur oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga dan tingginya mobilisasi masyarakat yang sulit dikontrol, sehingga pelaksanaan kegiatan seringkali tidak mencapai target maksimal.⁸

⁵ Hisbul Luthfi Ashsyarofi Aditya Widi Sutanta, Faisol, "IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERSINAR DALAM PENEKANAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU)," *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9011–25, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23627>.

⁶ Aditya Widi Sutanta, Faisol.

⁷ Nadine Theresya Tinida, Komang Adi Sastra Wijaya, and I Dewa Ayu Putri Wirantari, "Implementasi Program Desa Bersinar Dari Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan," *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.61292/shkr.212>.

⁸ Hammed Diputra Imfyan and Khairul Amri, "Efektivitas Program Desa Bersinar Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi," *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1296–1304.

Adanya ketimpangan hasil antara dua wilayah ini menghasilkan gap krusial yang perlu diteliti. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah efektivitas pemberantasan narkoba di tingkat desa murni ditentukan oleh desain program BNN, ataukah ada faktor kepemimpinan dan komitmen lokal yang lebih dominan?. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membedah dinamika tersebut, mengevaluasi sejauh mana elemen kontrol sosial Hirschi mampu bekerja dalam struktur birokrasi desa yang beragam, serta memetakan faktor-faktor determinan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah Desa Bersinar di Kota Batu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi program Desa Bersinar di Kota Batu, serta menganalisis upaya dan hambatan pelaksanaannya melalui pendekatan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian terdiri dari pegawai BNN Kota Batu yang memiliki kompetensi dan pengalaman khusus terkait topik yang diteliti. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali data primer melalui observasi di BNN Kota Batu dan wawancara mendalam secara bertahap. Informan dalam penelitian ini meliputi Ilham (Staf Sie Rehabilitasi), Anton, Sari, Yossy, dan Adi (Staf Sie Pemberantasan), serta Wulan (Staf Sie P2M).

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen resmi dari situs web BNNK Batu, penelitian terdahulu, rekap laporan kegiatan IBM 2024, serta dokumentasi lain yang relevan. Proses pengambilan data dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari hingga 30 April 2025. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan disajikan secara naratif deskriptif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan penelitian.

Berdasarkan kerangka metodologi yang telah ditetapkan, berikut dipaparkan hasil temuan lapangan yang dimulai dengan tinjauan sosiologis terhadap karakteristik wilayah penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tipologi Geografis dan Dinamika Transformasi Kontrol Sosial di Kota Wisata

Posisi geografis Desa Junrejo menawarkan dua sisi mata uang yang kontras bagi kehidupan masyarakatnya. Di satu sisi, letaknya yang sangat strategis sebagai jalur penghubung utama antara wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi warga setempat. Topografi wilayah yang mendukung sektor pariwisata serta lahan pertanian yang subur menjadi fondasi kuat yang menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat Junrejo secara berkelanjutan.⁹

Namun, konektivitas yang tinggi ini secara tidak sengaja menciptakan sebuah "ruang transit" yang bersifat sangat cair dan terbuka bagi siapapun. Kemudahan akses transportasi melalui jalan utama menjadikan desa ini sangat mudah dijangkau oleh pihak luar, termasuk individu dengan niat kriminal. Kondisi tersebut membuka pintu bagi mobilitas peredaran gelap narkoba yang sering kali memanfaatkan wilayah terbuka dan sibuk sebagai jalur distribusi yang sulit terdeteksi.

Tantangan utama yang dihadapi di Junrejo sebenarnya bukan hanya terletak pada aspek fisik wilayahnya, melainkan pada struktur sosialnya yang mulai mengalami pergeseran. Masyarakat desa ini kini telah menjadi sangat heterogen, yang terdiri dari kelompok petani, pedagang, hingga para pelaku industri jasa pariwisata.¹⁰ Keanekaragaman profesi dan latar belakang sosial ini menciptakan dinamika interaksi yang jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan struktur desa agraris pada umumnya.

Heterogenitas tersebut memiliki potensi besar untuk melonggarkan mekanisme kontrol sosial tradisional yang selama ini menjadi rem bagi perilaku menyimpang. Interaksi antarwarga cenderung berubah menjadi lebih transaksional seiring dengan meningkatnya tuntutan ekonomi dan arus modernisasi yang masuk. Akibatnya, pengawasan alami dari komunitas terhadap perilaku warga mulai berkurang karena

⁹ Kristyan Dwijosusilo, Agustiawan Djoko Baruno, Pritanto, Kusuma Wijaya, Sri Kamariyah, Mochamad Arfani, "Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Di Junrejo Kota Batu," *JOURNAL SYNTAX IDEA* 5, no. 12 (2023): 2701–15, <https://share.google/6jSYuJcNiHHloqAUI>.

¹⁰ Kristyan Dwijosusilo, Agustiawan Djoko Baruno, Pritanto, Kusuma Wijaya, Sri Kamariyah, Mochamad Arfani.

fokus masyarakat yang terpecah pada urusan pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, penetapan Desa Junrejo sebagai "Desa Bersinar" merupakan sebuah langkah strategis yang diambil berdasarkan data intelijen yang akurat atau *evidence-based policy*. Program ini dirancang sebagai respons langsung terhadap catatan kasus pengungkapan narkotika serta tingkat kerawanan wilayah yang dinilai cukup signifikan. Kehadiran program ini bertujuan untuk mengisi celah pengawasan sosial yang muncul akibat transformasi cepat desa menjadi kawasan wisata modern.

Secara sosiologis, intervensi ini diperlukan untuk menjahit kembali ikatan sosial yang mulai renggang akibat mobilitas penduduk yang tinggi. Dengan memperkuat kembali kontrol sosial di tingkat tapak, diharapkan kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata tidak harus dibayar dengan hancurnya moral generasi muda. BNNK Batu memandang bahwa penguatan struktur desa adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman asimetris narkoba di wilayah penghubung seperti Junrejo.

Salah satu akar masalah sosiologis yang memicu penyalahgunaan narkoba di tingkat perdesaan adalah budaya berkumpul atau "nongkrong" di kalangan remaja. Kebiasaan komunal ini sering kali dilakukan tanpa tujuan yang jelas atau pengawasan orang dewasa, sehingga menciptakan celah kerawanan yang besar. Tanpa adanya intervensi yang tepat, budaya "nongkrong" ini dapat dengan mudah berubah menjadi pintu masuk utama bagi distribusi dan penggunaan zat adiktif.

Program Desa Bersinar hadir bukan untuk menghapus atau melarang budaya berkumpul yang sudah menjadi bagian dari kearifan lokal. Sebaliknya, program ini berupaya melakukan transformasi budaya dengan mengisi waktu luang para remaja melalui berbagai aktivitas yang positif dan lebih produktif. Dengan demikian, energi sosial pemuda tidak terbuang sia-sia, melainkan diarahkan pada kegiatan yang membangun karakter dan memperkuat ketahanan diri.

Efektivitas dari model transformasi kultur ini telah memberikan bukti nyata melalui keberhasilan yang dicapai di Desa Pendem sebelumnya. Di wilayah percontohan tersebut, angka kasus narkotika berhasil ditekan secara drastis dari 9 kasus pada tahun

2020 menjadi hanya 4 kasus pada tahun 2022.¹¹ Keberhasilan signifikan di Desa Pendem inilah yang kemudian dijadikan sebagai standar atau tolok ukur utama bagi BNNK Batu untuk memperluas jangkauan program.

Pada tahun 2024, program Desa Bersinar resmi diperluas ke wilayah Junrejo dan Temas berdasarkan pertimbangan data kerawanan serta dukungan anggaran DIPA BNN. Namun, proses seleksi wilayah ini menyisakan sebuah catatan kritis mengenai pendekatan administratif yang digunakan oleh lembaga pusat. Penentuan lokasi sasaran dinilai cenderung terlalu fokus pada angka kriminalitas semata tanpa melihat secara mendalam aspek kesiapan internal dari masing-masing desa.

Kelemahan utama dalam mekanisme seleksi ini adalah minimnya asesmen mendalam terhadap "kesiapan politik" (*political will*) dari jajaran perangkat desa atau kelurahan setempat. Kurangnya perhatian terhadap faktor komitmen kepemimpinan lokal ini terbukti menjadi faktor krusial yang menentukan kegagalan program di Kelurahan Temas. Meskipun data kepolisian menunjukkan adanya kerawanan, namun tanpa dukungan birokrasi lokal, program tersebut akan mengalami stagnasi.

Hal ini memberikan pelajaran berharga bahwa efektivitas pemberantasan narkoba tidak hanya ditentukan oleh desain program yang bagus dari pusat. Peran aktif kepemimpinan lokal sangat menentukan apakah sebuah intervensi dapat diterima oleh masyarakat atau justru ditolak secara pasif. Oleh karena itu, kesiapan aparat desa seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai sasaran program "Desa Bersinar" di masa depan.

Melanjutkan analisis mengenai pergeseran struktur sosial dari agraris ke jasa pariwisata sebagaimana dijelaskan sebelumnya, fenomena ini membawa dampak signifikan terhadap pemaknaan ruang publik di Kota Batu.

Kota Batu saat ini berkembang pesat sebagai pusat pariwisata. Namun, kemajuan ini membawa perubahan sosial: tempat-tempat umum yang dulunya menjadi ruang silaturahmi warga, kini berubah menjadi tempat yang lebih terbuka dan bebas karena banyaknya pendatang dan wisatawan. Dalam teori Travis Hirschi, kesibukan dalam

¹¹ Aditya Widi Sutanta, Faisol, "IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERSINAR DALAM PENEKANAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU)."

kegiatan yang positif (*involvement*) seharusnya menjadi "rem" agar seseorang tidak berbuat menyimpang. Namun, di kota wisata seperti Batu, "rem" ini bisa blong jika ruang publiknya tidak dikelola dengan baik.

Salah satu tantangan di desa-desa seperti Junrejo adalah budaya "nongkrong" atau berkumpulnya anak muda tanpa tujuan jelas. Di mata teori kontrol sosial, waktu luang yang kosong ini sangat rawan karena bisa menjadi pintu masuk peredaran narkoba. Apalagi, sekarang banyak bermunculan warung dan kafe yang sifatnya "anonim"—artinya, orang bisa datang dan pergi tanpa saling kenal. Akibatnya, warga sekitar yang biasanya peduli menjadi cuek karena terlalu sibuk dengan urusan ekonomi masing-masing.

Program Desa Bersinar hadir untuk membereskan masalah ini dengan cara yang cerdas, bukan sekadar melarang orang berkumpul. BNNK Batu mengisi ruang-ruang publik tersebut dengan kegiatan yang lebih bermanfaat agar anak muda tetap punya pegangan moral (*belief*) dan kesibukan yang sehat (*involvement*). Berikut adalah langkah nyatanya: Menghidupkan Kembali Fasilitas Desa melalui Agen Pemulihan (AP), tempat seperti Gedung Pemuda atau kantor desa dijadikan pusat edukasi. Di sini, tokoh agama dan ibu-ibu PKK dilibatkan agar semua warga merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga desanya. Mengalihkan Energi Pemuda daripada sekadar nongkrong kosong, remaja didorong ikut kegiatan olahraga atau seni. Logikanya sederhana: jika tangan dan pikiran mereka sibuk dengan hal positif, tidak akan ada waktu atau kesempatan bagi pengedar narkoba untuk mendekati mereka. Patroli dan Pemetaan Lingkungan para Agen Pemulihan (AP) aktif memantau warung atau kafe yang dicurigai rawan penyalahgunaan. Mereka merangkul komunitas lokal seperti Karang Taruna untuk ikut mengawasi wilayahnya sendiri.

Hasilnya terlihat jelas di Desa Junrejo. Karena perangkat desanya kompak membantu BNN, budaya nongkrong yang tadinya berisiko kini lebih terkontrol berkat adanya Duta Anti Narkoba dan Satgas. Sebaliknya, di Kelurahan Temas, program ini macet karena pihak birokrasi lokal tidak memberikan dukungan. Hal ini membuktikan bahwa di kota wisata yang modern, pengawasan polisi saja tidak cukup; kita butuh

pengawasan alami dari masyarakat agar ruang publik tidak menjadi tempat peredaran narkoba.

Kebutuhan akan pengawasan alami di ruang public sebagaimana terlihat di Junrejo dan Temas, pada dasarnya dapat dijelaskan secara lebih mendalam melalui kacamata teoritis ikatan sosial.

2. Konstruksi Teori Kontrol Sosial Hirschi dalam Program Desa Bersinar

Implementasi Desa Bersinar di Kota Batu dijalankan melalui tiga pendekatan strategis yang menasar lapisan sosial berbeda:

a. Intervensi Mikrososiologi (Ketahanan Keluarga).

Implementasi Program Desa Bersinar di Kota Batu dijalankan melalui serangkaian pendekatan strategis yang dirancang untuk menasar berbagai lapisan sosial masyarakat. Salah satu pilar utamanya adalah intervensi pada level mikrososiologi melalui program penguatan Ketahanan Keluarga, intervensi dilakukan secara intensif kepada 10 keluarga terpilih di wilayah rawan. Meskipun jangkauan sampelnya terbilang kecil, kedalaman materi yang disampaikan mengenai pola asuh dan komunikasi empatik bertujuan menciptakan "imunitas" keluarga yang kuat.¹² Langkah ini diharapkan mampu membangun benteng pertahanan pertama di rumah tangga guna mencegah anak mencari pelarian pada zat adiktif. BNN menyadari sepenuhnya bahwa keluarga, terutama yang sedang mengalami kondisi *broken home*, merupakan unit yang paling rentan terhadap pengaruh buruk narkoba.

b. Pemanfaatan Jejaring Teman Sebaya (*Peer Group*).

Selain penguatan internal keluarga, program ini juga secara cerdas memanfaatkan kekuatan jejaring teman sebaya atau *peer group*. Remaja Kota Batu cenderung memiliki *trust issue* (masalah kepercayaan) terhadap otoritas formal seperti BNN, polisi dan guru, namun mereka sangat terbuka kepada teman sebayanya. Strategi ini diwujudkan melalui pembentukan Duta Anti Narkoba dan Satgas di lingkungan sekolah, seperti yang

¹² Naila Fauza Adhima and Trenda Aktiva Oktariyanda, "Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Jawa Timur," *Manajemen Strategi Badan Narkotika* 11, no. 4 (2023): 2365–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2365-2378>.

dilakukan di MTSN Junrejo dan SMAN 2.¹³ Hal itu merupakan upaya membalikkan tekanan teman sebaya (*peer pressure*) yang biasanya negatif menjadi positif. Siswa ditempatkan sebagai subjek pengawas, bukan lagi objek penyuluhan.¹⁴

c. Desentralisasi Rehabilitasi (IBM).

Di sisi lain, BNNK Batu juga mendorong langkah desentralisasi rehabilitasi melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat atau IBM. Pendekatan ini bertujuan untuk memotong hambatan birokrasi yang kaku serta menghilangkan stigma negatif masyarakat yang sering menghambat proses pemulihan pecandu. IBM bekerja dengan melatih warga lokal untuk menjadi Agen Pemulihan (AP) yang bertindak sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Para agen ini memiliki peran vital dalam melakukan pemetaan wilayah rawan hingga melakukan penjangkauan langsung ke rumah klien dengan pendekatan yang persuasif.¹⁵ Melalui cara ini, proses rehabilitasi menjadi jauh lebih inklusif dan manusiawi karena dilakukan oleh lingkungan sosial terdekat yang sudah dikenal oleh klien.

Secara keseluruhan, dinamika program ini mencerminkan upaya sistematis untuk memperkuat kembali kontrol sosial yang sempat melemah di masyarakat. Dengan mengintegrasikan elemen keluarga, remaja, dan relawan warga, BNNK Batu berusaha menciptakan ekosistem desa yang mandiri dalam menangkal peredaran narkoba. Keberhasilan aksi komunitas ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada seberapa besar ruang yang diberikan oleh pemerintah desa bagi para Agen Pemulihan untuk bergerak.

Hirschi menulis teorinya saat Amerika Serikat sedang mengalami transisi sosial yang radikal. Pada masa itu, struktur masyarakat tradisional sedang digugat, dengan rasa ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi seperti pemerintah, kepolisian, dan sekolah akibat Perang Vietnam dan isu rasial. Hirschi mengamati bahwa ketika

¹³ Wawancara dengan Wulan pegawai sie P2M, Jum'at, 28 Februari 2025 di kantor BNN Kota Batu.

¹⁴ Defrito Bima Oktavio and Andri Winjaya, "PERANAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI BNNP JAWA TENGAH)," *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 2 2 (2019): 275–86.

¹⁵ Melati Aulia Suci, Luthfi Salim, and Ellya Rosana, "Program Intervensi Berbasis Masyarakat BNN Pada Penyalahgunaan Narkoba Di Kelurahan Cawang Jakarta Timur," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 6, no. 2 (2024): 149–56, <https://doi.org/10.51486/jbo.v6i2.196>.

kewibawaan institusi-institusi ini melemah, angka kenakalan remaja justru meningkat; hal ini membawanya pada kesimpulan bahwa bukan "kemiskinan" semata yang menyebabkan kejahatan karena banyak orang kaya juga menyimpang, melainkan sejauh mana individu merasa terikat pada aturan main di masyarakatnya. Latar belakang pemikiran Hirschi sangat revolusioner karena ia mengubah cara pandang kriminologi: sebelum tahun 1969, para ahli sibuk mencari "apa yang salah dengan penjahat?", dengan mencari faktor biologis, psikologis, atau ekonomi yang mendorong orang berbuat jahat karena pada masa itu, teori yang populer adalah teori yang menghubungkan kejahatan dengan kelas bawah (orang miskin berbuat jahat karena tidak punya uang).

Hirschi merasa penjelasan ini tidak lengkap. Hirschi justru berasumsi bahwa keinginan untuk menyimpang itu ada pada setiap manusia karena sifat dasar manusia yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara tercepat dan termudah. Oleh karena itu, ia tidak mencari penyebab kejahatan, melainkan mencari penyebab kepatuhan pada aturan.¹⁶ Ia ingin tahu apa "rem" yang menahan seseorang agar tidak berbuat jahat meskipun ada kesempatan. Menurut teori Kontrol Sosial ini berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut. Artinya, remaja dari keluarga kaya pun bisa menjadi nakal jika mereka tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang tua atau tidak peduli dengan sekolah. Inilah yang melatarbelakangi 4 elemen ikatan sosial: *Attachment, Commitment, Involvement, Belief* sebagai faktor yang melintasi batas kelas ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang diinisiasi oleh BNNK Batu adalah manifestasi praktis dari Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Program ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi pada penguatan rem kontrol sosial masyarakat agar penyimpangan (penyalahgunaan narkoba) tidak terjadi. Kaitan mendalam antara elemen teori Hirschi dengan strategi operasional Desa Bersinar di Kota Batu mencakup: Attachment (Keterikatan) melalui Ketahanan Keluarga. Hirschi berargumen bahwa individu yang memiliki ikatan kasih

¹⁶ Suyud Puguh Sunoto, "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja : Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* Volume 6, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>.

sayang kuat dengan orang tua cenderung patuh pada norma. Dalam hal ini, orang tua dilatih membangun komunikasi yang empatik dengan anak untuk menciptakan ikatan emosional; ketika hubungan emosional di rumah kuat, seorang anak di Kota Batu akan merasa "sayang" jika harus merusak hubungan tersebut dengan menggunakan narkoba. Ikatan emosional ini menjadi benteng pertama yang mencegah mereka mencari pelarian ke zat adiktif. Commitment (Komitmen) melalui Peran Relawan & Pegiat. Komitmen adalah tentang "investasi" seseorang dalam masyarakat. Semakin banyak yang dipertaruhkan (reputasi, status), semakin takut seseorang untuk melanggar aturan. Kaitannya dengan Program Desa Bersinar yaitu penunjukan tokoh masyarakat, pemuda, hingga siswa di Batu sebagai Relawan Anti Narkoba atau Pegiat P4GN menciptakan status sosial baru bagi mereka. Seseorang yang telah diberikan mandat sebagai Duta Anti Narkoba memiliki "modal sosial" yang besar. Mereka akan berpikir ribuan kali untuk menyentuh narkoba karena taruhannya adalah hancurnya reputasi dan kepercayaan masyarakat yang telah mereka bangun secara resmi melalui program ini. Involvement (Keterlibatan) melalui Pemberdayaan Masyarakat. Hirschi meyakini bahwa kesibukan dalam aktivitas konvensional akan menutup celah bagi perilaku menyimpang (*idle hands are the devil's workshop*). Kaitannya dengan Program Desa Bersinar mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan desa, seperti olahraga, seni budaya lokal di Batu, hingga pelatihan wirausaha bagi remaja. Dengan adanya jadwal yang padat oleh kegiatan produktif yang difasilitasi desa, waktu luang remaja untuk berkumpul di lingkungan yang berisiko narkoba berkurang drastis. Keterlibatan fisik dan pikiran dalam hal positif secara otomatis membatasi ruang gerak sindikat narkoba untuk masuk. Belief (Keyakinan) melalui Sosialisasi & Norma Kolektif. Elemen ini berkaitan dengan internalisasi nilai bahwa narkoba adalah musuh yang nyata dan merusak. Kaitannya dengan Program Desa Bersinar melalui spanduk, sosialisasi rutin di tingkat RT/RW, dan edukasi di sekolah-sekolah, BNNK Batu menanamkan keyakinan kolektif bahwa "Narkoba adalah Aib dan Musuh Bersama". Ketika seluruh warga desa memiliki keyakinan moral yang sama, akan muncul sanksi sosial bagi mereka yang melanggar. Keyakinan ini memastikan masyarakat tidak apatis dan berani melaporkan jika melihat adanya peredaran narkoba, karena mereka percaya menjaga desa adalah kewajiban moral yang suci.

Program Desa Bersinar di Kota Batu bekerja dengan cara memperbaiki sistem kontrol sosial yang mungkin sempat melemah. BNNK Batu tidak hanya datang sebagai polisi, tetapi sebagai fasilitator untuk menjahit kembali ikatan sosial warga agar setiap individu memiliki alasan kuat untuk tetap sehat dan produktif tanpa narkoba.

Implementasi program Desa Bersinar di Kota Batu mengandalkan kombinasi antara penyebaran informasi secara masif dan pendekatan personal di tingkat tapak. Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif melalui sosialisasi rutin yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Setiap Agen Pemulihan (AP) diwajibkan melakukan minimal satu kali sosialisasi di ruang publik desa dengan unsur peserta yang berbeda guna memastikan inklusivitas informasi.

Sebagai contoh, di Desa Junrejo, AP Pendik Ariyanto melaksanakan sosialisasi pada 28 Juni 2024 di Gedung Pemuda yang dihadiri oleh 21 tokoh lintas agama. Langkah ini disusul oleh AP Yuli Pratiwi pada 29 Juni 2024 yang memberikan edukasi kepada 30 anggota PKK Desa Junrejo.¹⁷ Fokus utama KIE ini adalah menanamkan keyakinan kolektif bahwa narkoba merupakan musuh bersama, sehingga muncul mekanisme kontrol sosial alami dari dalam komunitas itu sendiri.

Selain KIE, efektivitas program ini ditentukan oleh kekuatan pemetaan dan penjangkauan lapangan melalui skema Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pada 6 Juli 2024, AP Pendik Ariyanto melakukan pemetaan wilayah di Dusun Jeding, Desa Junrejo, untuk mengidentifikasi titik rawan seperti warung atau kafe yang berpotensi menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba. Pemetaan ini juga mengidentifikasi potensi sinergi dengan organisasi lokal seperti Karang Taruna, Satlinmas, dan Posyandu sebagai jembatan intervensi.¹⁸

Puncak dari aksi lapangan ini adalah kegiatan kunjungan rumah (home visit) untuk menjangkau individu yang terindikasi sebagai pengguna. Pada 9 Juli 2024, AP Pendik Ariyanto melakukan penjangkauan terhadap calon klien bernama Andi Setyawan. Melalui pendekatan persuasif dan pemberian motivasi kepada keluarga, AP berhasil meyakinkan klien untuk bersedia mengikuti program IBM.¹⁹ Proses ini membuktikan

¹⁷ Rekap laporan kegiatan IBM Junrejo 2024.

¹⁸ Rekap laporan kegiatan IBM Junrejo 2024.

¹⁹ Rekap laporan kegiatan IBM Junrejo 2024.

bahwa desentralisasi rehabilitasi melalui warga lokal mampu memotong hambatan birokrasi dan menghilangkan stigma yang selama ini menghalangi pecandu untuk pulih.

Meskipun secara teoritis elemen kontrol sosial telah terintegrasi dalam program BNNK Batu, namun pengaplikasian nya di lapangan menghadapi dinamika yang berbeda pada setiap wilayah, sebagaimana yang terungkap dalam perbandingan kasus berikut ini.

3. Dialektika Keberhasilan dan Hambatan Struktural: Studi Komparatif Junrejo dan Temas

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah kontras tajam antara efektivitas program di Desa Junrejo dan Kelurahan Temas. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan program *top-down* dari BNN sangat bergantung pada penerimaan bottom-up dari elit lokal. Sinergi antara kebijakan pusat dan kesiapan daerah menjadi kunci utama dalam menentukan hasil akhir program tersebut.

Keberhasilan di Junrejo didorong oleh tingginya partisipasi aktif Agen Pemulihan (AP) dan dukungan penuh dari perangkat desa. Para Agen Pemulihan mampu melakukan pemetaan mandiri secara efektif terhadap titik-titik rawan seperti warung dan kafe di wilayah mereka. Kerja keras ini membuahkan hasil nyata dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat akar rumput.

Selain itu, AP di Junrejo berhasil menjangkau klien rehabilitasi secara persuasif, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus klien Andi Setyawan. Struktur sosial desa yang kooperatif menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaksanaan program rehabilitasi tersebut. Kondisi ini memungkinkan seluruh rencana kerja BNN Kota Batu dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan sosial yang berarti.

Sebaliknya, Kelurahan Temas menunjukkan resistensi birokrasi yang nyata sehingga menghambat implementasi kebijakan di lapangan. Indikator kegagalan ini terlihat jelas dari ketidakhadiran perangkat kelurahan dalam setiap sesi Bimbingan Teknis (BIMTEK). Selain itu, mereka juga menolak untuk mengisi kuesioner Indeks Kerawanan yang sangat dibutuhkan sebagai basis data program.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Wulan pegawai sie P2M, Jum'at, 28 Februari 2025 di kantor BNN Kota Batu.

Sikap apatis dari pemangku kebijakan lokal membuat pihak BNN mengalami kesulitan besar untuk masuk dan melakukan intervensi. Program pun mengalami stagnasi dan kehilangan efektivitasnya dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kelurahan Temas. Akibat dari ketidaksiapan ini, Temas secara resmi dicoret dari daftar Desa Bersinar untuk periode tahun 2025.

Fenomena ini membuktikan bahwa tanpa dukungan otoritas lokal (*local strongman*), program nasional sebaik apapun akan gagal di tingkat tapak. Otoritas di tingkat tapak memegang peranan vital sebagai pintu gerbang masuknya inovasi kebijakan dari pemerintah pusat. Ke depannya, komitmen elit lokal harus menjadi syarat mutlak sebelum sebuah program dijalankan di suatu wilayah.

Keberhasilan sebuah kebijakan publik di tingkat akar rumput tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan desain program di tingkat pusat, melainkan sangat bergantung pada penerimaan dan kesiapan struktur birokrasi di tingkat tapak. Fenomena ini terlihat jelas dalam studi kasus di Kelurahan Temas, di mana program mengalami stagnasi total bukan karena kurangnya anggaran dari BNNK Batu, melainkan karena adanya tembok resistensi dari perangkat kelurahan setempat. Tanpa adanya *political will* yang kuat, agen-agen pemulihan (AP) di tingkat bawah kehilangan legitimasi untuk bergerak, sehingga fungsi kontrol sosial yang seharusnya diperkuat melalui elemen commitment dan involvement dalam teori Hirschi menjadi lumpuh. Hambatan ini membuktikan bahwa desentralisasi pencegahan narkoba memerlukan sinkronisasi persepsi antara lembaga vertikal seperti BNNK dengan pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan.

Selain masalah komitmen, keterbatasan sumber daya finansial dan sarana prasarana di tingkat desa juga menjadi kerikil tajam dalam pelaksanaan program ini. Ketika perangkat desa tidak memberikan ruang anggaran atau fasilitas bagi kegiatan sosialisasi rutin, maka program Desa Bersinar hanya akan menjadi jargon di atas kertas tanpa sentuhan nyata ke lapisan masyarakat terdalam. Oleh karena itu, hambatan struktural ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan narkoba di tingkat desa membutuhkan syarat mutlak berupa asesmen kesiapan kepemimpinan lokal yang dilakukan secara tertulis dan mengikat sebelum program dijalankan.

Akibat dari ketidaksiapan ini, Temas secara resmi dicore dari daftar Desa Bersinar untuk periode tahun 2025. Fenomena ini membuktikan bahwa tanpa dukungan otoritas lokal, program nasional sebaik apapun akan gagal di tingkat tapak.

Stagnasi di Kelurahan Temas yang sebelumnya dipaparkan sebagai akibat dari ketidakhadiran perangkat dalam BIMTEK, jika dibedah lebih dalam merupakan manifestasi dari patologi birokrasi. Hal ini menciptakan kekosongan otoritas yang mengakibatkan Agen Pemulihan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Kegagalan di Kelurahan Temas merupakan patologi birokrasi di tingkat tapak yang menghambat efektivitas kontrol sosial.

4. Analisis Mendalam: Patologi Birokrasi dan Kritis Kontrol Sosial

Kegagalan di Kelurahan Temas merupakan potret nyata dari "Patologi Birokrasi" di tingkat tapak yang menghambat efektivitas kontrol sosial. Dalam kacamata Hirschi, elemen *Commitment* (Komitmen) seharusnya menjadi jangkar bagi individu maupun institusi untuk patuh pada norma demi menjaga reputasi. Namun, di Temas terjadi paradoks; upaya menjaga reputasi wilayah justru dilakukan dengan cara yang salah, yaitu melalui resistensi terhadap transparansi data. Penolakan pengisian kuesioner Indeks Kerawanan menunjukkan adanya kekhawatiran elit lokal bahwa label "daerah rawan" akan merusak citra kelurahan, padahal kejujuran data adalah basis utama dari kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Secara sosiologis, ketika perangkat kelurahan absen dalam Bimbingan Teknis (BIMTEK), mereka secara tidak langsung memutus rantai *Involvement* (Keterlibatan) institusional. Hal ini menciptakan kekosongan otoritas yang mengakibatkan Agen Pemulihan (AP) kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Tanpa dukungan "*Local Strongman*" atau tokoh kuat di tingkat kelurahan, program Desa Bersinar hanya menjadi instrumen administratif yang hampa tanpa kekuatan eksekusi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Desa Junrejo, di mana keterlibatan perangkat desa berfungsi sebagai "katalisator" yang mempercepat penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan anti-narkoba.

Hambatan struktural ini juga diperparah oleh minimnya sinkronisasi antara anggaran vertikal BNNK dengan anggaran otonom desa. Meskipun BNNK memiliki

desain program yang komprehensif, operasional harian di lapangan sering kali membutuhkan dukungan logistik mandiri. Di Temas, ketiadaan alokasi ruang dan sumber daya membuat program ini stagnan, membuktikan bahwa desentralisasi pencegahan narkoba tidak akan berjalan jika tidak ada kesepahaman bahwa narkoba adalah ancaman eksistensial bagi birokrasi lokal itu sendiri.

Kegagalan ini memberikan pelajaran bahwa "Kesiapan Politik" (*Political Will*) bukan sekadar dukungan lisan, melainkan kesediaan untuk membuka diri terhadap intervensi luar demi keselamatan warga jangka panjang.

Pelajaran berharga mengenai patologi birokrasi dan pentingnya kesiapan politik ini menuntut adanya langkahh konkret berupa rekalisasi model kebijakan Desa Bersinar agar lebih responsif dan adaptif

5. Implikasi Kebijakan: Penguatan Model Desa Bersinar melalui Rekalisasi Kontrol Sosial

Berdasarkan temuan mengenai disparitas efektivitas program di Desa Junrejo dan Kelurahan Temas, penelitian ini merumuskan implikasi kebijakan strategis bagi BNNK Batu untuk memperkuat model "Desa Bersinar" di masa depan. Rekomendasi ini berfokus pada pengubahan paradigma intervensi dari sekadar pemenuhan administratif menjadi penguatan struktur sosial yang berkelanjutan.

a. Rekalisasi Mekanisme Seleksi Wilayah: Menuju "Kesiapan Politik"

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tingginya angka kriminalitas narkoba di suatu wilayah tidak menjamin keberhasilan program jika tidak dibarengi dengan dukungan birokrasi lokal. Oleh karena itu, BNNK Batu perlu mengadopsi standar Kesiapan Politik (*Political Will*) sebagai syarat mutlak pra-penetapan wilayah.

Sebelum sebuah desa ditetapkan sebagai "Desa Bersinar", BNNK Batu perlu melakukan transformasi mekanisme seleksi wilayah dari yang semula bersifat administrative *top-down* menjadi seleksi berbasis komitmen-kontraktual dengan kata lain BNNK Batu disarankan mewajibkan Kepala Desa atau Lurah menandatangani komitmen tertulis untuk mendukung penuh program, termasuk menjamin akses data Indeks Kerawanan yang seringkali ditutupi demi menjaga citra wilayah. Pakta ini harus

menjamin akses penuh terhadap data wilayah dan penyediaan sarana fisik bagi para AP, sehingga elemen *Attachment* (Keterikatan) warga terhadap program memiliki landasan formal yang kuat dalam melakukan kontrol sosial. Dengan demikian dalam rangka mendukung berjalan nya program Desa Bersinar, BNNK Batu disarankan mewajibkan adanya pakta integritas kepemimpinan yang mengikat secara hukum antar kepala daerah tingkat desa dengan BNNK Batu.

b. Pelembagaan Kontrol Sosial melalui Produk Hukum Lokal

Keberlanjutan program "Desa Bersinar" seringkali terancam oleh pergantian kepemimpinan atau berakhirnya dukungan anggaran pusat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelembagaan nilai-nilai *commitment* dan *involvement* Hirschi ke dalam sistem formal desa.

Pelembagaan Kontrol Sosial melalui pembentukan produk hukum lokal seperti Peraturan Desa (Perdes) tentang P4GN "BNNK Batu harus mendorong desa untuk menerbitkan regulasi lokal yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat RT/RW." Selama ini, banyak program Desa Bersinar yang bersifat temporer karena hanya bergantung pada masa tugas pejabat tertentu atau ketersediaan anggaran pusat. Adanya Perdes, program ini akan menjadi agenda tetap yang wajib didanai melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan demikian, operasional harian Agen Pemulihan dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga kegiatan sosialisasi dan penjangkauan tidak bersifat temporer. Langkah ini akan memperkuat elemen *Belief* (Keyakinan) masyarakat bahwa pencegahan narkoba adalah kewajiban kolektif yang dipayungi oleh hukum adat dan hukum desa.

c. Transformasi Agen Pemulihan (AP) sebagai Agen Perubahan Sosial

Agen Pemulihan di Desa Junrejo telah membuktikan bahwa pendekatan persuasif mampu memotong hambatan birokrasi dan stigma negatif. Kebijakan ke depan harus memposisikan AP bukan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai *social broker*. Peningkatan kapasitas Agen Pemulihan (AP) sebagai "*Social Broker*" harus menjadi prioritas. Mengingat remaja di Kota Batu memiliki tantangan berupa *Trust Issue*

terhadap aparat formal, AP harus dibekali dengan keahlian komunikasi empatik yang mampu menjembatani jarak antara otoritas dan kaum muda. Sinergi antara AP dengan unit sosial yang sudah ada, seperti Karang Taruna dan PKK, harus diperluas untuk memastikan bahwa transformasi budaya "nongkrong" bersifat negatif menjadi aktivitas produktif dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada BNNK.

Dengan melakukan rekalisasi pada aspek kepemimpinan, regulasi, dan kapasitas agen, model Desa Bersinar dapat berkembang menjadi lingkungan pertahanan mandiri yang mampu bertahan di tengah dinamika transformasi sosial kota wisata.

Seluruh rangkaian analisis dan rekomendasi strategis tersebut membawa penelitian ini pada beberapa kesimpulan pokok terkait masa depan pemberantasan narkoba di Kota Batu.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama:

1. Efektivitas Teoretis, program Desa Bersinar terbukti selaras dengan elemen kontrol sosial Hirschi dalam menciptakan "rem" terhadap penyalahgunaan narkoba melalui penguatan ketahanan keluarga (attachment), keterlibatan relawan (commitment), pemberdayaan pemuda (involvement), dan internalisasi norma anti-narkoba (belief).
2. Determinasi Kepemimpinan Lokal, keberhasilan program di tingkat akar rumput tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan desain kebijakan dari BNN pusat, melainkan sangat bergantung pada dukungan aktif (political will) kepemimpinan lokal. Kelurahan Temas menunjukkan bahwa tanpa dukungan otoritas lokal, program akan mengalami stagnasi akibat hambatan administratif dan resistensi terhadap transparansi data.
3. Kebutuhan Rekalisasi Kebijakan, diperlukan transformasi model Desa Bersinar dari pendekatan administratif top-down menjadi pendekatan berbasis komitmen-kontraktual. Keberlanjutan program harus dijamin melalui pelebagaan hukum lokal (Peraturan Desa) agar tidak bersifat temporer dan memiliki dasar pendanaan yang mandiri di tingkat desa.

BNNK Batu disarankan melakukan asesmen komitmen kepemimpinan lokal secara tertulis dan mengikat melalui pakta integritas sebagai syarat mutlak sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai "Desa Bersinar" di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adhima, N. F., & Oktariyanda, T. A. (2023). Manajemen strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. *Publika*, 11(4), 2365–2378.
<https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2365-2378>
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba 2019*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) BNN Republik Indonesia.
<https://share.google/6jSYuJcNiHHloqAUl>
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Rekap laporan kegiatan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Junrejo Tahun 2024* (laporan internal, tidak dipublikasikan).
- Badan Narkotika Nasional Kota Batu. (2025). *Profil Badan Narkotika Nasional Kota Batu*. Diakses 20 Maret 2025 dari
https://sikarsa.um.ac.id/storage/data_cp/cp_NtE8Kn3KWY_111224_1733878927.pdf
- Dewi, N. K. R. K. (2025). Analisis kritis teori kontrol sosial dan aplikasinya dalam pencegahan kejahatan komunitas. *Jurnal Aktual Justice*, 10(1), 79–93.
<https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1504>
- Diputra Imfyan, H., & Amri, K. (2022). Efektivitas Program Desa Bersinar di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Cross-Border*, 5(2), 1296–1304.
- Kristyan Dwijosusilo, Baruno, A. D., Pritanto, Wijaya, K., Kamariyah, S., & Arfani, M. (2023). Pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Junrejo Kota Batu. *Journal Syntax Idea*, 5(12), 2701–2715. <https://share.google/6jSYuJcNiHHloqAUl>
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman bahaya narkoba di Indonesia pada era globalisasi. *Jurnal Education and Development Institut*, 10(2), 137–143.
- Oktavio, D. B., & Winjaya, A. (2019). Peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh anak (Studi kasus di BNNP Jawa Tengah). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)*, 2(2), 275–286.
- Suci, M. A., Salim, L., & Rosana, E. (2024). Program intervensi berbasis masyarakat BNN pada penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Cawang Jakarta Timur. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 6(2), 149–156.
<https://doi.org/10.51486/jbo.v6i2.196>
- Sunoto, & Puguh, S. (2023). Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif teori kontrol sosial Travis

Hirschi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(1), 1–11.

<https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>

Sutanta, A. W., Faisol, & Ashsyarofi, H. L. (2024). Implementasi Program Desa Bersinar dalam penekanan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Batu). *Dinamika*, 30(1), 9011–9025.

<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23627>

Tinida, N. T., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2), 1–16.

<https://doi.org/10.61292/shkr.212>